

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Libya adalah Negara di Afrika Utara telah menjadi pusat perhatian global sejak pemberontakan tahun 2011 yang menyebabkan tergulingnya rezim otoriter Kolonel Muammar Gaddafi. Meskipun lengsernya Gaddafi menjanjikan era baru demokrasi dan stabilitas, tahun-tahun berikutnya ditandai dengan perjalanan yang kompleks dan penuh gejolak yang ditandai dengan transisi politik, tantangan ekonomi, dan ketidakstabilan yang terus-menerus. Latar belakang ini memberikan konteks bagi pertanyaan utama penelitian: “Bagaimana kondisi Libya setelah Pembangunan Demokrasi pasca Muammar Al-Gaddafi?”

Arab Spring atau Musim Semi Arab merupakan gelombang revolusioner yang terjadi di Timur Tengah dan Afrika Utara, yang semula diawali pada Sabtu, 18 Desember 2010, di Tunisia. Muhammad Bouazizi, sarjana yang tidak mendapatkan pekerjaan formal lalu menjual buah-buahan dan sayuran di pasar membakar dirinya sebagai protes terhadap korupsi dan penganiayaan pemerintah. Aksinya menciptakan solidaritas mayoritas rakyat Tunisia, yang kemudian bangkit menentang pemerintah yang represif dan korup. Tidak sampai di situ, api Bouazizi pun menjalar di banyak negara Arab hingga menumbangkan beberapa diktator Arab, termasuk Presiden Tunisia

Zein ElAbidin Ben Ali. Keberhasilan revolusi Tunisia menginspirasi gerakan serupa di negara-negara Arab lainnya, khususnya Mesir, Libya, Suriah, Yaman, dan Bahrain. Protes ini sebagian besar dipicu oleh keluhan terkait represi politik, kesenjangan ekonomi, korupsi, dan kurangnya kebebasan politik. Keberhasilan revolusi Tunisia menginspirasi gerakan serupa di negara-negara Arab lainnya, khususnya Mesir, Libya, Suriah, Yaman, dan Bahrain. Protes ini sebagian besar dipicu oleh keluhan terkait represi politik, kesenjangan ekonomi, korupsi, dan kurangnya kebebasan politik. Di Libya, protes meningkat menjadi konflik bersenjata skala penuh antara pasukan pemberontak dan rezim Muammar Gaddafi. Dengan intervensi NATO, Gaddafi akhirnya digulingkan dan dibunuh pada bulan Oktober 2011.

Penggulingan rezim Gaddafi pada tahun 2011 menandai titik balik dalam sejarah Libya. Namun, euforia pembebasan segera digantikan oleh kenyataan pahit berupa negara yang terpecah belah. Transisi Libya dirusak oleh menjamurnya kelompok-kelompok bersenjata, tidak adanya institusi negara yang kuat, dan kekosongan kekuasaan yang mengundang campur tangan eksternal. Negara ini menjadi terfragmentasi berdasarkan garis regional, suku, dan ideologi, dengan berbagai milisi bersaing untuk mendapatkan kendali.

Imajinasi yang muncul setelah runtuhnya rezim Gaddafi dengan cepat berubah menjadi konflik yang berlarut-larut dan beraneka ragam. Lanskap politik Libya menjadi medan pertempuran bagi faksi-faksi yang saling bersaing, termasuk *Government of National Accord* (GNA) yang diakui

secara internasional yang berbasis di Tripoli dan *House of Representative* (HoR) yang berbasis di Tobruk. Jenderal Khalifa Haftar, yang memimpin *Libya National Army* (LNA), menantang legitimasi GNA dan berusaha merebut ibu kota, Tripoli. Perebutan kekuasaan yang terus-menerus ini semakin memicu ketidakstabilan politik.

Selama masa pemerintahan Gaddafi, berbagai inisiatif ambisius telah dimulai di berbagai sektor seperti pendidikan, perawatan kesehatan, perumahan, pembangunan infrastruktur, dan subsidi untuk kebutuhan pokok dan bahan makanan. Langkah-langkah ini menghasilkan peningkatan kualitas hidup yang signifikan bagi penduduk Libya, mengubah negara ini dari salah satu negara termiskin di Afrika pada tahun 1969 menjadi negara Afrika peringkat teratas dalam hal Indeks Pembangunan Manusia pada tahun 2011 (Baspineiro 2020). Bahkan, *United Nations Development Programme* (2010) menganggap Libya sebagai negara dengan tingkat perkembangan tinggi di Timur Tengah dan Afrika Utara. Status ini diterjemahkan sebagai tingkat melek huruf sebesar 88,4 persen, angka harapan hidup 74,5 tahun, kesetaraan gender, dan beberapa indikator positif lainnya (Baspineiro 2020). Pada saat kematiannya, Libya menduduki posisi teratas di Afrika dalam hal PDB per kapita dan harapan hidup). Selain itu, tingkat kemiskinan di negara ini lebih rendah daripada Belanda.

Keterlibatan aktor-aktor internasional saat perang terjadi menjadi salah satu hal yang perlu di amati. Berbagai kekuatan asing menaruh perhatian

aktif terhadap urusan Libya, memberikan dukungan kepada berbagai faksi dan berkontribusi terhadap kompleksitas konflik.

Ketika perselisihan internal Libya meningkat, hal ini menarik perhatian dan intervensi dari kekuatan-kekuatan asing, aktor-aktor regional, dan organisasi-organisasi internasional (Ghafar ,2021). Dimensi eksternal dari konflik ini menambah lapisan kompleksitas pada situasi yang sudah rumit, yang tidak hanya berdampak pada Libya tetapi juga pada lanskap geopolitik yang lebih luas (Ghafar, 2021).

Beberapa kekuatan regional, termasuk Mesir, Uni Emirat Arab (UEA), dan Turki, terlibat dalam konflik ini dengan memberikan dukungan militer kepada faksi-faksi yang berseberangan (Mezran,Karim, dan Ellisa 2017). Keterlibatan mereka memperdalam garis patahan di dalam Libya dan berkontribusi pada meningkatnya permusuhan. Selain itu, kehadiran tentara bayaran dari negara-negara seperti Rusia dan Suriah semakin memperumit situasi, yang secara efektif menginternasionalisasi konflik (Mezran,Karim, dan Miller 2017).

Masuknya aktor-aktor eksternal dan kepentingan mereka yang berbeda menciptakan lingkungan yang terfragmentasi dan ter polarisasi, di mana pengejaran tujuan-tujuan geopolitik sering kali lebih diutamakan daripada kesejahteraan dan stabilitas negara Libya (Mezran,Karim, dan Miller 2017). Intervensi eksternal ini sering kali memperburuk perpecahan yang ada

dan menggagalkan upaya mencapai penyelesaian damai (Mezran, Karim, dan Miller 2017).

Periode tahun 2020 hingga 2023 menyaksikan perkembangan politik yang signifikan di Libya. Penandatanganan Perjanjian Politik Libya pada tahun 2015 mengarah pada *pembentukan Government National Accord* (GNA) di Tripoli dan House of Representative (HoR) di Tobruk. Namun, kekuatan politik masih terfragmentasi, dengan *Libya National Army* (LNA), yang dipimpin oleh Jenderal Khalifa Haftar, menantang legitimasi GNA dan berusaha merebut ibu kota, Tripoli. Perebutan kekuasaan yang sedang berlangsung antara pemerintahan-pemerintahan yang bersaing ini semakin memperburuk ketidakstabilan politik.

Lanskap politik Libya masih sangat terpecah-pecah, dengan kekuasaan yang terdistribusi di antara banyak aktor. Jenderal Khalifa Haftar, yang memimpin Tentara *Libya National Army* (LNA), menentang legitimasi GNA dan melancarkan kampanye militer untuk merebut ibu kota, Tripoli (Blanchard, 2022). Perebutan kekuasaan yang sedang berlangsung antara pemerintahan yang saling bersaing ini semakin memicu ketidakstabilan politik dan memperparah perpecahan di dalam negeri (Blanchard, 2022).

Pada 23 Oktober tahun 2020, perjanjian gencatan senjata ditengahi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang mengarah pada perundingan perdamaian baru dan upaya untuk membentuk pemerintahan persatuan. Hal ini menandai perkembangan positif dan meningkatkan harapan akan adanya

jalan menuju stabilitas. Namun, perpecahan politik, keluhan yang sudah berlangsung lama, dan ketidakpercayaan di antara para aktor utama terus menimbulkan tantangan signifikan terhadap koherensi politik negara . Pada 20 Desember 2021, Utusan Khusus dan Duta Besar AS untuk Libya Richard Norland mengunjungi Tripoli dan mengatakan, "Amerika Serikat akan terus terlibat dengan lembaga dan pemimpin Libya dengan tujuan pemilihan presiden dan parlemen yang damai, bebas, adil, inklusif, dan kredibel, yang akan membuka jalan menuju masa depan yang bersatu dan stabil bagi Libya." (Blanchard,2022).

Perang Saudara Libya Kedua, yang berlangsung dari tahun 2014 hingga 2020, menandai periode enam tahun yang penuh gejolak yang ditandai dengan konflik intens antara berbagai faksi bersenjata, terutama Dewan Perwakilan Rakyat (HoR) dan Pemerintah Kesepakatan Nasional. Perselisihan ini terjadi karena adanya interaksi multifaset dari perpecahan suku, regional, politik, dan agama, dengan beragam koalisi yang bersaing untuk mendominasi negara. Perjuangan untuk mendapatkan kendali melampaui batas-batas suku dan wilayah, sehingga mengakibatkan negara terfragmentasi, ditandai dengan masih adanya kekhawatiran mengenai migrasi, perdagangan manusia, dan stabilitas ekonomi. Berasal dari kerusuhan setelah pemberontakan tahun 2011 melawan pemerintahan Muammar al-Qaddafi selama empat dekade, yang menyebabkan runtuhnya rezimnya dan akhirnya kehancurannya, konflik ini diperburuk oleh tantangan dalam membangun kembali lembaga-lembaga negara dan

proliferasi senjata pasca tahun 2011. Komunitas internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, menyatakan kekhawatirannya mengenai meningkatnya kekerasan dan keterlibatan kekuatan asing dalam konflik tersebut, sehingga mempersulit upaya untuk meredakan ketegangan dan menemukan resolusi jangka panjang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti merumuskan masalah utama yang akan dikaji yaitu : Bagaimana Pembangunan demokrasi Libya pasca kejatuhan rezim Muammar Al-Gaddafi?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang telah dirumuskan oleh peneliti yaitu menganalisis dinamika pembangunan demokrasi Libya pasca kejatuhan rezim Muammar Al- Gaddafi

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini di harapkan menjadi manfaat dari segi praktis maupun akademis.

- a. Dari segi akademis, penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan pengetahuan dan penelitian dalam memahami Transisi demokrasi yang ada di Libya. Dalam transisi demokrasi terhadap kondisi ekonomi Libya. Perhatikan perubahan dalam sektor-sektor utama, investasi

asing, dan stabilitas ekonomi selama periode transisi. Lalu juga dampak intervensi dan dukungan eksternal terhadap transisi demokrasi Libya. Tinjau peran aktor internasional, organisasi regional, dan dampak kebijakan luar negeri terhadap perkembangan politik dan ekonomi Libya.

- b. Dari segi praktis, diharapkan penelitian ini dapat dapat membantu mengidentifikasi dan menganalisis akar konflik di Libya pasca-Gaddafi, memberikan dasar untuk upaya rekonsiliasi dan pemulihan juga penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan dan pandangan mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan transisi demokrasi di Libya.

1.5 Sistematika Penulisan

Proposal skripsi ini terdiri atas empat bab, dalam setiap Bab terdapat sub-bab yang disesuaikan dengan bahasan penelitian terdiri atas:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah/pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan yang menjelaskan tentang permasalahan transisi Libya dari otokrasi menjadi demokrasi, lalu disini juga membahas singkat tentang intervensi negara asing yang ada di Libya yang dimana ini memberikan dampak terhadap perkembangan Libya saat ini.

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tinjauan pustaka, kerangka teoritik, kerangka pemikiran, memuat metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini.

BAB III LIBYA DALAM PEMERINTAHAN MUAMMAR AL-GADDAFI DAN GELOMBANG MUSIM SEMI DI TANAH ARAB

Bab ini peneliti mendeskripsikan dan menjelaskan mengenai Sejarah dan pemerintahan selama masa kepemimpinan Gaddafi dari aspek politik, ekonomi, dan social, dan juga mendeskripsikan pemerintahan pasca akhirnya masa pemerintahan Gaddafi yang lalu bertransisi dari otokrasi menjadi demokrasi dan membahas tantangan dan kesulitan yang di alami Libya dalam transisi kepemimpinan yang baru.

BAB IV DIANTARA BENTURAN PERADABAN BARAT DAN TIMUR : KECACATAN PEMBANGUNAN DEMOKRASI DAN KERAPUHAN NEGARA LIBYA PASCA MUAMMAR AL-GADDAFI

Bab ini peneliti mendeskripsikan dan menjelaskan mengenai keadaan Libya setelah kegagalan Pembangunan Demokrasi yang disebabkan oleh Benturan Peradaban, walaupun sudah menandatangani perjanjian gencatan senjata Negara ini masih terpecah di antara faksi-faksi yang bersaing, dengan lanskap politik yang rapuh dan kekhawatiran akan keamanan yang terus berlanjut.

BAB V RENCANA PENUTUP

Bab ini berisi sub-bab mengenai perkiraan kesimpulan dan perkiraan rekomendasi.

